

DAFTAR PUSTAKA

- Assyakurrohim, D., Ikham, D., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2023). Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif. *Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(1), 1–9.
- Bagaswara, I., Muslim, A. K., & Harahap, E. F. (2020). Analisis Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kabupaten Garut. *Wahana Akuntansi*, 05.
- Baringin, A. V. P., & Inayati. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah Di Kota Bekasi. *Ilmiah Indonesia*, 7(10).
- Fadhlurrohman, M. I., Febriyanti, S., Adam, R. F., & Tunapsiah, D. (2025). Sifat Perubahan Dan Pengembangan Organisasi: Studi Kasus Manajemen Perubahan Di CV Sinar Brahma Rasyid Cilongkrang, Kabupaten Garut. *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 06, 29–36.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami Desain Metode Penelitian Kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1>.
- Hall, P. A. (2010). Policy Paradigms , Social Learning , And The State The Case Of Economic Policymaking In Britain. *Comporative Politics*, 25(3), 275–296.
- Haromin, Riswati, & Helwani. (2025). Digitalisasi Layanan Perpajakan Daerah Di Kabupaten Bandung: Tantangan Dan Peluang Berbasis Teori. *Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, 9, 106–117.
- Harsoyo, & Pudjiarti, E. S. (2024). Transformasi Kebijakan Publik Melalui Pendekatan Quintuple Helix : Mendorong Komersialisasi Produk Ramah Lingkungan Dari Sumber Daya Lokal. *Ilmiah*, 13(2), 193–207.
- Ika, M. M., & Wahyudin, D. (2021). Analisis Evaluasi Penerapan Pemungutan Pajak Air Tanah dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah di BAPENDA Kota Bekasi (Studi Kasus BAPENDA Kota Bekasi). *Ilmu Administrasi Publik*, 1(4), 448–458.
- Indriyani, R. Y., & Khasanah, E. N. (2026). Efektivitas Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah: Bukti Empiris Kabupaten Bantul. *Litrasi Akuntansi*, 6(2), 381–391. <https://doi.org/10.55587/jla.v6i2.294>
- Jasmiatussifilfila, Maulidina, A., Safitri, A., Hasanah, M., & Djasuli, M. (2025). Mekanisme Pemberlakuan Pajak Air Tanah : Realitas Dan Kinerja Di Lapangan. *Ilmiah MEA*, 9(2), 323–339.

- Kawengian, I., Wawointana, T., & Kandouw, S. (2024). Implementasi Kebijakan Penguatan Moderasi Beragama Di Kota Bitung Imanuel. *Administro*, 6(2), 123–130.
- Kidengsing, E. J., Stefanus, K. Y., & Udju, H. R. (2023). Pengaturan Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Kerangka Otonomi Daerah (Studi Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kabupaten Alor). *Ilmiah Indonesia*, 3(5), 495–511.
- Mekarisce, A. A. (2020). Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif Di Bidang Kesehatan Masyarakat. *Ilmiah Kesehatan*, 12(33).
- Mulyani, F., & Fatdilah, S. (2025). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2020-2024. *Ekonomi Dan Bisnis*, 27(2).
- Mulyanti, D. (2022). Kearifan Lokal Masyarakat Terhadap Sumber Mata Air Sebagai Upaya Konservasi Dan Pengelolaan Sumber Daya Lingkungan. *Bina Hukum Lingkungan*, 6.
- Mutia, R., Maira, H., Mawahyudi, A., & Vientiany, D. (2025). Evaluasi Kebijakan Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. *Ilmiah Research Student*, 2(2), 172–182.
- Nugraha, D. R., Olivia, R. V., Fransisko, R., Satmaidi, E., & Suaka, M. (2026). Hubungan Keuangan Pusat Dan Daerah Dalam Perspektif Otonomi Fiskal Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah. *Analisis Hukum Dan Kebijakan*, 7(1), 106–121.
- Nurfajriani, W. V., Ilhami, W. M., Mahendra, A., Sirodj, R. A., & Afgani, M. W. (2024). Triangulasi Data Dalam Analisis Data Kualitatif Wiyanda. *Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(September), 826–833.
- Pangerapan, S., & Suwetja, I. G. (2025). Analisis Penerapan UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Dalam Tata Cara Pemungutan Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Serta Kontribusinya Pada Pendapatan Asli Daerah. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3 Nomor 2, 466–475. <https://doi.org/10.58784/rapi.369>
- Perkasa, F. D., Suwardi, & W, P. K. (2025). Implementasi Kebijakan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Sistem Online Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Studi Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum). *Ilmiah*, 14(1).

- Prabowo, A., & Suprajogo, T. (2025). Implementasi Kebijakan Transformasi Tata Kelola Di BUMN: Studi Kasus PT PP (Persero). *Ilmiah Nasional*, 7(1), 137–149.
- Prasasti, P. A. M., & Widiyanto, H. W. (2024). Dampak Ekonomi Dan Lingkungan Pembangunan Kawasan Industri Kabupaten Brebes. *Public Policy And Administration Research*, 02.
- Purbaningrum, D., & Adinugraha, H. H. (2023). Transformasi Kebijakan Publik: Menyiasati Ketidaktepatan Sasaran Bantuan Sosial Di Desa Pringsurat Untuk Kesejahteraan Masyarakat Yang Lebih Baik. *Pembangunan Dan Kebijakan Publik*, 15(September 2022).
- Qomaruddin, & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman. *Management, Accounting and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rahayu, H. A. (2025). Kesiapan Pengelolaan Pajak Daerah Dalam Implementasi UU HKPD Pada Kabupaten / Kota Di Jawa Timur. *Of Economics Research and Policy Studies*, 5(3), 859–869.
- Rakhmawati, I., Suhaedi, W., Prasidya, T. C. I. T., & Yulianingsih, H. (2026). Dampak UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Daerah (UU HKPD) Terhadap Kebijakan Fiskal Pemerintah Daerah. *Tata Sejuta*, 12(1).
- Revana, D., Waluyo, & Candrakirana, R. (2025). Analisis Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Peningkatan Pendapatan Pajak Air Tanah. *Of Social Sciences and Humanities*, 5(1), 18–24.
- Sa'adah, M., Rahmayati, G. T., & Prasetyo, Y. C. (2022). Strategi Dalam Menjaga Keabsahan Data Pada Penelitian Kualitatif. *Al 'Adad: Jurnal Tadris Matematika*, 1, 54–64.
- Sigalingging, E. L. (2025). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Pemungutan Pajak Air Tanah Di Kota Tebing Tinggi.
- Sugianto, I., Rivai, A., Jamruddin, Ruslan, & Nur, M. (2025). Analisis Yuridis Terhadap Sikronisasi Pengaturan Pajak Dan Retribusi Daerah Pasca UU Nomor 1 Tahun 2022. *Imiah Pemerintahan*, 13(1), 250–260.
- Tamyn, L. I., Warongan, J. D. L., & Korompis, C. W. M. (2025). Analisis Komparatif Penerimaan Pajak Dan Retribusi Daerah Sebelum Dan Sesudah Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Di Badan Pendapatan

Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 3 Nomor 2(2022), 428–438. <https://doi.org/10.58784/rapi.364>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Issue 104172). (2022).

Waruwu, M. (2024). Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep , Prosedur , Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan. *Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan*, 5, 198–211.

Yanasari, D., & Amirah. (2021). Optimalisasi Peningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Oleh Bapenda Kabupaten Tegal. *Akuntansi Dan Bisnis Komputer*, 1(2), 198–210.

Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024). Dampak Berlakunya Kebijakan UU No 1 Tahun 2022 Tentang HKPD Terhadap Penerimaan Pajak Dan Di Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan Dan Keuangan*, 13(04), 1347–1354.